Journal Islamic Studies of Muhammadiyah
Biro AIK Universitas Muhammadiyah Gresik

Rekonstruksi Pendidikan Karakter Politik Berbasis Etika Kepemimpinan Ibnu Bajjah bagi Generasi Digital: Sebuah Kajian Filsafat Sosial-Politik

Khairuddin[1], Sopian Lubis[2]
*khairuddin@al-hikmah.ac.id, [1] sopianlubis1975@gmail.com
*STIT Al-Hikmah Tebibg Tinggi, Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial-politik masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai tantangan terhadap pembentukan karakter politik generasi muda, seperti meningkatnya disinformasi, polarisasi politik, krisis integritas kepemimpinan, serta melemahnya kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan paradigma pendidikan karakter politik yang memiliki landasan etis dan filosofis yang kuat. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pendidikan karakter politik berbasis etika kepemimpinan Ibnu Bajjah bagi generasi digital melalui kajian filsafat sosial-politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari karya-karya primer Ibnu Bajjah, khususnya *Tadbīr al-Mutawaḥḥid*, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan filsafat politik Islam, pendidikan karakter, dan kepemimpinan digital. Analisis data dilakukan melalui *content analysis*, hermeneutika filosofis, dan rekonstruksi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan Ibnu Bajjah dibangun atas empat prinsip utama, yaitu rasionalitas (*al-'aql*), keutamaan moral (*faḍīlah*), pengelolaan diri (*tadbīr al-nafs*), dan orientasi pada kemaslahatan bersama (*sa'ādah*). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini merekonstruksi model pendidikan karakter politik yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu rasionalitas kritis, integritas moral, kepemimpinan reflektif, dan orientasi kemaslahatan publik. Model ini menjadi kontribusi teoretis penelitian dalam menghubungkan khazanah filsafat sosial-politik Islam klasik dengan kebutuhan pendidikan karakter pada era digital.

Kata Kunci: Ibnu Bajjah; Pendidikan Karakter Politik; Etika Kepemimpinan; Filsafat Sosial-Politik; Generasi Digital.

ABSTRACT

Digital transformation has fundamentally reshaped socio-political interactions while simultaneously creating significant challenges for the political character formation of the younger generation, including the spread of misinformation, political polarization, declining leadership integrity, and weakened critical and reflective thinking. These challenges highlight the need for a political character education paradigm grounded in strong ethical and philosophical foundations. This study aims to reconstruct political character education based on Ibn Bājjah's ethics of leadership for the digital generation through a socio-political philosophical approach. The study employed a qualitative library research design. Primary data were collected from Ibn Bājjah's major work, *Tadbīr al-Mutawaḥḥid*, complemented by scholarly literature on Islamic political philosophy, character education, and digital leadership. Data were analyzed using content analysis, philosophical hermeneutics, and conceptual reconstruction. The findings reveal that Ibn Bājjah's ethics of leadership are founded upon four principal values: rationality (*al-'aql*), moral virtue (*faḍīlah*), self-governance (*tadbīr al-nafs*), and orientation toward the common good (*sa'ādah*). Based on these principles, this study proposes a reconstructed model of political character education consisting of four interrelated dimensions: critical rationality, moral integrity, reflective leadership, and public-oriented virtue. This model represents the primary theoretical contribution of the study by bridging the classical tradition of Islamic socio-political philosophy with the contemporary demands of political character education in the digital era. **Keywords: Ibn Bājjah; Political Character Education; Leadership Ethics; Socio-Political Philosophy; Digital Generation.**

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk pandangan politik, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Media sosial dan berbagai platform digital membuka ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapat, mengakses informasi politik, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan sosial (Pratama et al., 2025; Alkhadafi, 2026). Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan terhadap kualitas kehidupan demokratis, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, manipulasi opini publik, dan menguatnya budaya pencitraan dalam kepemimpinan (Mubarok et al., 2025; Alkhadafi, 2025). Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut kualitas pertimbangan moral dalam menentukan sikap dan tindakan politik. Kemampuan mengakses informasi, misalnya, tidak selalu diikuti oleh kecakapan mengevaluasi kebenaran informasi atau mempertimbangkan dampak sosial dari penyebarannya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendidikan karakter politik yang tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan kewargaan dan literasi digital, tetapi juga mengembangkan rasionalitas, integritas moral, kemandirian berpikir, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik (Hariati & Amelia, 2026). Dalam konteks tersebut, filsafat sosial-politik memiliki peran penting untuk menjelaskan landasan etis pembentukan karakter politik sekaligus menawarkan kerangka konseptual bagi pengembangan kepemimpinan yang bertanggung jawab di era digital.

Kajian mengenai pemikiran Ibnu Bajjah telah berkembang melalui berbagai perspektif, mulai dari filsafat manusia dan psikologi hingga tindakan etis dan pemikiran politik. Penelitian (Manurung & Gazali, 2025) melalui kajian mengenai konsep *al-mutawaḥḥid* sebagai bentuk manajemen stres dan kesehatan mental pada era modern, menghubungkan pemikiran Ibnu Bajjah dengan persoalan psikologis kontemporer. Penelitian (Taib, 2026) membahas konsepsi jiwa Ibnu Bajjah dan rekonstruksi psikologi manusia, sedangkan penelitian (Pangesti & Hidayat, 2023) mengkaji tindakan manusia dalam *Tadbīr al-Mutawaḥḥid*. Dalam ranah filsafat politik, penelitian (Kohar, 2020) menganalisis pemikiran politik Islam Ibnu Bajjah melalui karya tersebut. Sementara itu, penelitian (Nurhalimah et al., 2025) membahas pemikiran dan filsafat Ibnu Bajjah secara lebih umum. Kelima kajian tersebut memperlihatkan keluasan pemikiran Ibnu Bajjah dalam menjelaskan hubungan antara pembentukan diri, tindakan manusia, dan kehidupan sosial-politik. Meskipun demikian, berdasarkan fokus kajian yang telah diidentifikasi, masih terdapat ruang untuk mempertemukan pembahasan mengenai pembentukan diri dan pemikiran politik Ibnu Bajjah dengan diskursus pendidikan karakter politik kontemporer. Secara khusus, hubungan antara konsep *al-mutawaḥḥid*, pembentukan keutamaan moral, etika kepemimpinan, dan tantangan politik generasi digital memerlukan pengembangan konseptual lebih lanjut. Ruang kajian ini penting karena pemikiran Ibnu Bajjah tidak hanya dapat dibaca sebagai bagian dari sejarah filsafat Islam, tetapi juga dapat ditelaah untuk menemukan prinsip-prinsip etis yang relevan bagi pembentukan karakter dalam kehidupan publik.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi pendidikan karakter politik berbasis etika kepemimpinan Ibnu Bajjah bagi generasi digital melalui pendekatan filsafat sosial-politik. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana

landasan etika kepemimpinan dapat ditafsirkan dari pemikiran sosial-politik Ibnu Bajjah, bagaimana prinsip-prinsip tersebut relevan untuk memahami tantangan pembentukan karakter politik generasi digital, dan bagaimana prinsip tersebut dapat direkonstruksi menjadi model konseptual pendidikan karakter politik yang kontekstual. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menelaah gagasan Ibnu Bajjah mengenai rasionalitas (*al-ʻaql*), keutamaan moral (*faḍīlah*), pembentukan dan pengelolaan diri, serta kebahagiaan (*saʻādah*), dengan tetap mempertimbangkan konteks filosofis dan historis pemikirannya. Konsep-konsep tersebut kemudian didialogkan secara kritis dengan persoalan kepemimpinan, partisipasi politik, dan tanggung jawab warga dalam ruang digital. Rekonstruksi dilakukan bukan dengan menyamakan pemikiran Ibnu Bajjah dengan teori pendidikan modern, melainkan dengan mengidentifikasi prinsip filosofis yang dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan kontemporer. Pendekatan ini menempatkan tradisi filsafat politik Islam sebagai sumber refleksi teoretis yang dapat berdialog dengan perkembangan pemikiran pendidikan karakter dan kewargaan digital.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa pendidikan karakter politik bagi generasi digital perlu mengintegrasikan kecakapan intelektual, pembentukan moral, pengelolaan diri, dan orientasi terhadap kepentingan publik. Kemampuan menggunakan teknologi dan memahami informasi politik belum memadai apabila tidak disertai kemampuan menilai informasi secara rasional, mempertahankan integritas di tengah tekanan sosial, serta mempertimbangkan konsekuensi etis dari tindakan politik. Pemikiran Ibnu Bajjah menyediakan landasan untuk mengembangkan argumentasi tersebut melalui gagasan tentang penyempurnaan akal, pembentukan keutamaan, dan kemampuan individu menjaga orientasi moral di tengah lingkungan sosial yang tidak selalu mendukung kehidupan berkeutamaan. Dalam penelitian ini, gagasan tersebut direkonstruksi ke dalam empat dimensi pendidikan karakter politik, yaitu rasionalitas kritis, integritas moral, kepemimpinan reflektif, dan orientasi pada kemaslahatan publik. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada penyusunan hubungan konseptual antara prinsip-prinsip filosofis Ibnu Bajjah dan empat dimensi tersebut dalam kerangka pendidikan karakter politik bagi generasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, dan merekonstruksi pemikiran sosial-politik Ibnu Bajjah sebagai landasan konseptual pendidikan karakter politik bagi generasi digital (Sugiyono, 2018). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa gagasan filosofis yang termuat dalam karya-karya primer Ibnu Bajjah dan literatur ilmiah yang membahas filsafat sosial-politiknya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Ibnu Bajjah yang berkaitan dengan filsafat sosial-politik dan etika, terutama *Tadbīr al-Mutawaḥḥid* sebagai karya utama yang membahas pengelolaan diri, relasi individu dengan masyarakat, serta pencapaian keutamaan dalam kehidupan politik. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan risalah-risalah filosofis Ibnu Bajjah yang membahas akal (*al-'aql*), kebahagiaan (*saʻādah*), dan kesempurnaan manusia. Data sekunder diperoleh dari buku-

buku, artikel jurnal bereputasi nasional maupun internasional, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas filsafat politik Islam, etika kepemimpinan, pendidikan karakter, kewargaan digital (*digital citizenship*), dan kepemimpinan pada era digital. Literatur-literatur tersebut digunakan untuk memetakan perkembangan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan kajian (*research gap*), sekaligus membangun dialog kritis antara pemikiran Ibnu Bajjah dan persoalan sosial-politik kontemporer (Moleong J lexy, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam pemikiran Ibnu Bajjah, seperti *al-mutawaḥḥid*, *faḍīlah* (keutamaan), *al-'aql* (rasionalitas), *tadbīr al-nafs* (pengelolaan diri), dan *sa'ādah* (kebahagiaan). Tahap kedua adalah analisis hermeneutik filosofis, yaitu menafsirkan makna konsep-konsep tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis pemikiran Ibnu Bajjah sekaligus relevansinya terhadap persoalan sosial-politik kontemporer. Tahap ketiga adalah rekonstruksi konseptual, yaitu menyusun sintesis teoretis berupa model pendidikan karakter politik berbasis etika kepemimpinan Ibnu Bajjah yang sesuai dengan karakteristik generasi digital (Spradley & Huberman, 2024). Penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai karya primer Ibnu Bajjah dan interpretasi para sarjana kontemporer mengenai filsafat sosial-politiknya. Selain itu, dilakukan triangulasi teori melalui dialog antara pemikiran Ibnu Bajjah dengan teori pendidikan karakter, etika kebajikan (*virtue ethics*), filsafat politik, dan kewargaan digital (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filsafat Sosial-Politik Ibnu Bajjah

Filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah (w. 1139 M) lahir dalam konteks dinamika politik Andalusia yang ditandai oleh fragmentasi kekuasaan, konflik antarkerajaan, serta kemunduran kualitas moral para pemimpin. Kondisi tersebut membentuk corak pemikiran politik Ibnu Bajjah yang berbeda dari Al-Farabi maupun Ibnu Sina. Jika Al-Farabi lebih menekankan pembangunan *al-Madīnah al-Fāḍilah* (negara utama) sebagai ruang ideal bagi berkembangnya keutamaan manusia, Ibnu Bajjah justru memulai analisisnya dari individu yang hidup dalam masyarakat yang belum ideal (Nurhalimah et al., 2025). Melalui karya monumentalnya *Tadbīr al-Mutawaḥḥid*, ia mengembangkan gagasan bahwa pembaruan sosial-politik harus diawali dengan pembinaan karakter individu yang mampu mempertahankan rasionalitas dan keutamaan moral di tengah lingkungan yang mengalami degradasi etika.

Dalam perspektif Ibnu Bajjah, manusia merupakan makhluk rasional (*al-insān al-nāṭiq*) yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan melalui pengembangan akal. Akal tidak hanya dipahami sebagai instrumen berpikir logis, tetapi juga sebagai kemampuan membedakan kebenaran dan kebatilan, mengendalikan hawa nafsu, serta menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan (Taib, 2026). Oleh karena itu, kualitas kehidupan politik suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas intelektual dan moral individu-individu yang menyusunnya. Politik tidak sekadar dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana mewujudkan kehidupan yang baik (*the good life*) melalui kepemimpinan yang berorientasi pada kebajikan (*faḍīlah*).

Konsep sentral dalam filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah adalah *al-mutawaḥḥid*, yang sering diterjemahkan sebagai "manusia soliter". Namun, istilah tersebut tidak menunjukkan sikap individualistik atau penolakan terhadap kehidupan sosial. *Al-mutawaḥḥid* merupakan individu yang mampu menjaga integritas intelektual dan moral ketika hidup di tengah masyarakat yang mengalami penyimpangan nilai. Kesendirian yang dimaksud bersifat epistemologis dan etis, yakni kemampuan berpikir secara mandiri, tidak larut dalam opini mayoritas yang keliru, serta tetap berpegang pada kebenaran meskipun menghadapi tekanan sosial. Dengan demikian, konsep ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk otonomi moral daripada isolasi sosial.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Bajjah menempatkan kebebasan berpikir sebagai prasyarat utama bagi lahirnya masyarakat yang berkeutamaan. Individu yang kehilangan kemampuan berpikir kritis akan mudah terjebak dalam imitasi (*taqlīd*), manipulasi politik, maupun dominasi kekuasaan yang tidak berlandaskan rasionalitas. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi sarana penting untuk membentuk manusia yang mampu mengembangkan potensi akalnya secara optimal. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter moral sehingga seseorang mampu bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dan etis. Selain menekankan rasionalitas, Ibnu Bajjah juga memandang bahwa tujuan akhir kehidupan manusia adalah mencapai *sa'ādah* (kebahagiaan). Berbeda dengan kebahagiaan yang bersifat material atau hedonistik, *sa'ādah* dipahami sebagai kesempurnaan jiwa melalui perpaduan antara kecerdasan intelektual dan keutamaan moral (Ramadhani et al., 2025). Dalam konteks politik, seorang pemimpin tidak diukur berdasarkan kemampuan menguasai kekuasaan atau memperoleh legitimasi publik semata, melainkan berdasarkan kemampuannya membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, rasional, dan bermartabat. Dengan demikian, etika kepemimpinan menjadi inti dari filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah karena menentukan arah perkembangan individu maupun masyarakat.

Pemikiran Ibnu Bajjah memiliki kedekatan dengan tradisi *virtue ethics* yang dikembangkan Aristoteles. Keduanya menempatkan keutamaan (*virtue*) sebagai fondasi kehidupan politik yang baik. Akan tetapi, Ibnu Bajjah memberikan dimensi spiritual yang lebih kuat dengan menghubungkan kesempurnaan intelektual pada pencapaian tujuan eksistensial manusia. Jika Aristoteles menekankan pembentukan warga negara melalui polis, Ibnu Bajjah lebih menyoroti pembentukan pribadi yang berkeutamaan sebagai prasyarat bagi lahirnya masyarakat yang sehat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa transformasi sosial menurut Ibnu Bajjah berlangsung dari individu menuju masyarakat, bukan sebaliknya.

Pemikiran tersebut juga memiliki titik temu dengan teori kepemimpinan etis (*ethical leadership*) dalam kajian kontemporer. Brown, Treviño, dan Harrison menjelaskan bahwa kepemimpinan etis dibangun atas integritas, keteladanan moral, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep *faḍīlah* yang dikembangkan Ibnu Bajjah, meskipun berangkat dari tradisi intelektual yang berbeda. Kesamaan ini menunjukkan bahwa filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah tetap memiliki relevansi dalam menjawab persoalan kepemimpinan modern, terutama ketika masyarakat menghadapi krisis integritas, populisme, penyalahgunaan informasi, dan menurunnya kualitas ruang publik digital.

Dalam konteks generasi digital, gagasan *al-mutawaḥḥid* memperoleh makna baru. Kehidupan digital ditandai oleh arus informasi yang sangat cepat, algoritma media sosial yang membentuk preferensi politik, serta tekanan untuk mengikuti opini yang sedang populer. Fenomena tersebut sering kali mengurangi kemampuan individu untuk melakukan refleksi kritis dan mengambil keputusan secara independen. Akibatnya, generasi muda berpotensi menjadi konsumen informasi yang pasif, mudah terpengaruh disinformasi, serta kehilangan orientasi etis

dalam kehidupan politik. Pada titik inilah konsep *al-mutawaḥḥid* menjadi relevan sebagai paradigma pendidikan karakter politik yang menekankan kemandirian berpikir, pengendalian diri, integritas moral, dan keberanian mempertahankan kebenaran di tengah tekanan mayoritas.

Etika Kepemimpinan dalam Pemikiran Ibnu Bajjah

Etika kepemimpinan merupakan salah satu dimensi penting dalam filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah, meskipun tidak dirumuskan secara sistematis sebagaimana teori kepemimpinan modern. Gagasan kepemimpinannya tersebar dalam pembahasan mengenai *al-mutawaḥḥid*, kesempurnaan akal (*al-'aql*), keutamaan moral (*faḍīlah*), dan tujuan hidup manusia (*sa'ādah*). Bagi Ibnu Bajjah, kepemimpinan bukan sekadar persoalan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, melainkan kemampuan membimbing diri sendiri dan masyarakat menuju kehidupan yang rasional, adil, dan berkeutamaan (Pangesti & Hidayat, 2023). Oleh karena itu, legitimasi seorang pemimpin tidak terutama ditentukan oleh posisi politiknya, tetapi oleh kualitas moral dan intelektual yang dimilikinya. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Ibnu Bajjah bersifat etis sekaligus edukatif, karena pemimpin diposisikan sebagai teladan dalam membentuk karakter masyarakat.

Prinsip pertama dalam etika kepemimpinan Ibnu Bajjah adalah supremasi rasionalitas (*al-'aql*). Ibnu Bajjah memandang akal sebagai anugerah tertinggi yang membedakan manusia dari makhluk lain sekaligus menjadi dasar dalam mengambil keputusan politik. Seorang pemimpin ideal harus mampu menggunakan pertimbangan rasional untuk menilai persoalan publik secara objektif, tidak terjebak pada dorongan emosional, kepentingan kelompok, atau tekanan massa. Rasionalitas bukan hanya kemampuan berpikir logis, tetapi juga kemampuan melakukan refleksi kritis terhadap berbagai informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks politik modern, prinsip ini menjadi semakin relevan ketika ruang publik dipenuhi oleh banjir informasi, disinformasi, propaganda digital, dan manipulasi opini melalui algoritma media sosial. Pemimpin yang kehilangan kemampuan berpikir rasional akan mudah terjebak pada kebijakan populis yang mengutamakan popularitas jangka pendek daripada kemaslahatan masyarakat.

Selain rasionalitas, Ibnu Bajjah menempatkan keutamaan moral (*faḍīlah*) sebagai fondasi kepemimpinan. Keutamaan dipahami sebagai karakter yang terbentuk melalui pembiasaan tindakan baik sehingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Pemimpin yang berkeutamaan ditandai oleh kejujuran, keadilan, kesederhanaan, keberanian moral, dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah instrumen dominasi, melainkan amanah untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak memiliki nilai intrinsik; nilainya ditentukan oleh sejauh mana kekuasaan digunakan untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Konsep *faḍīlah* Ibnu Bajjah memiliki kesesuaian dengan teori *virtue ethics* Aristoteles yang memandang karakter sebagai inti tindakan etis. Namun, Ibnu Bajjah memperluas konsep tersebut dengan menempatkan dimensi spiritual dan intelektual sebagai bagian integral dari pembentukan karakter. Keutamaan tidak hanya lahir melalui kebiasaan, tetapi juga melalui proses penyempurnaan akal yang mengarahkan manusia pada kebenaran. Dengan demikian, kepemimpinan etis menurut Ibnu Bajjah merupakan perpaduan harmonis antara kecerdasan intelektual, kematangan moral, dan orientasi spiritual.

Prinsip berikutnya adalah pengelolaan diri (*tadbīr al-nafs*). Sebelum memimpin masyarakat, seseorang harus terlebih dahulu mampu memimpin dirinya sendiri. Pengendalian diri mencakup kemampuan mengelola hawa nafsu, ambisi kekuasaan, emosi, serta berbagai kepentingan pribadi yang dapat mengganggu objektivitas keputusan politik. Dalam *Tadbīr al-*

Mutawaḥḥid, Ibnu Bajjah menekankan bahwa manusia yang tidak mampu mengatur dirinya akan sulit mencapai kesempurnaan moral, apalagi membimbing orang lain menuju kehidupan yang baik. Oleh karena itu, kepemimpinan dimulai dari disiplin pribadi, bukan dari legitimasi politik.

Gagasan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan teori authentic leadership, yang menekankan kesadaran diri (*self-awareness*), integritas, konsistensi nilai, dan kemampuan bertindak sesuai prinsip moral. Pemimpin autentik tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal karena memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Dalam perspektif Ibnu Bajjah, karakter tersebut tercermin pada sosok *al-mutawaḥḥid*, yaitu individu yang mampu mempertahankan integritas moral di tengah masyarakat yang mengalami krisis nilai. Dengan demikian, *al-mutawaḥḥid* tidak hanya merupakan figur filosofis, tetapi juga model kepemimpinan yang mampu menjaga independensi berpikir dan keberanian moral dalam menghadapi tekanan sosial maupun politik.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah orientasi pada kemaslahatan bersama (*sa'ādah al-jamā'iyyah*). Bagi Ibnu Bajjah, tujuan akhir kepemimpinan bukanlah keberhasilan individu, melainkan terciptanya masyarakat yang mampu berkembang secara intelektual, moral, dan sosial. Kebahagiaan (*sa'ādah*) tidak dipahami sebagai kepuasan material, melainkan sebagai kesempurnaan manusia yang dicapai melalui kehidupan yang berkeutamaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan politik harus diarahkan untuk mendukung berkembangnya potensi manusia, memperkuat keadilan sosial, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan dan moralitas.

Perspektif tersebut menunjukkan adanya titik temu dengan konsep servant leadership, yang memandang pemimpin sebagai pelayan bagi masyarakat. Pemimpin bukan pusat kekuasaan, melainkan fasilitator yang membantu masyarakat berkembang secara optimal. Meskipun lahir dari tradisi intelektual yang berbeda, kedua pendekatan sama-sama menempatkan pelayanan, tanggung jawab moral, dan kepentingan publik sebagai tujuan utama kepemimpinan. Perbedaannya terletak pada landasan filosofisnya. Jika *servant leadership* berangkat dari teori organisasi modern, maka Ibnu Bajjah mendasarkan kepemimpinan pada filsafat kesempurnaan manusia dan pengembangan akal sebagai jalan menuju kebahagiaan.

Dalam konteks generasi digital, etika kepemimpinan Ibnu Bajjah menawarkan kritik terhadap kecenderungan munculnya kepemimpinan performatif, yaitu kepemimpinan yang lebih menekankan pencitraan dibandingkan substansi. Media sosial sering kali mendorong pemimpin untuk mengejar popularitas melalui konten yang menarik perhatian publik, meskipun tidak selalu mencerminkan kualitas moral maupun kapasitas intelektual. Fenomena ini berpotensi melahirkan budaya politik yang mengutamakan sensasi, polarisasi, dan viralitas dibandingkan argumentasi rasional. Akibatnya, legitimasi kepemimpinan lebih banyak dibangun melalui algoritma digital daripada integritas pribadi.

Ibnu Bajjah secara implisit mengkritik kecenderungan tersebut melalui konsep *al-mutawaḥḥid*. Pemimpin yang ideal tidak boleh menjadikan opini publik sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Sebaliknya, ia harus memiliki keberanian moral untuk mempertahankan keputusan yang benar meskipun tidak populer. Rasionalitas dan keutamaan moral harus menjadi dasar dalam setiap tindakan politik. Dalam masyarakat digital, sikap ini penting untuk mencegah lahirnya kepemimpinan yang mudah dipengaruhi tren media sosial, tekanan kelompok, atau kepentingan ekonomi-politik yang mengabaikan nilai-nilai etis.

Tantangan Pendidikan Karakter Politik bagi Generasi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, proses pembelajaran politik, serta cara generasi muda memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi digital tumbuh dalam lingkungan yang ditandai oleh konektivitas tanpa batas, akses informasi yang sangat cepat, serta intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Kondisi tersebut membuka peluang bagi peningkatan partisipasi politik, perluasan akses terhadap pengetahuan, dan tumbuhnya ruang-ruang deliberasi baru. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan serius terhadap pembentukan karakter politik karena proses sosialisasi politik tidak lagi hanya berlangsung melalui keluarga, sekolah, atau institusi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh algoritma digital, *influencer*, komunitas virtual, dan platform media sosial yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik.

Salah satu tantangan utama pendidikan karakter politik pada era digital adalah melimpahnya informasi yang tidak selalu diikuti oleh kemampuan berpikir kritis. Generasi digital memperoleh informasi politik dari berbagai sumber dalam waktu yang hampir bersamaan. Akan tetapi, kemudahan akses tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan melakukan verifikasi, evaluasi sumber, maupun analisis rasional terhadap informasi yang diterima. Akibatnya, disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik lebih mudah menyebar serta memengaruhi cara pandang masyarakat. Dalam situasi demikian, pendidikan karakter politik tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan mengenai demokrasi atau sistem pemerintahan, tetapi juga harus membentuk kemampuan intelektual dan moral agar peserta didik mampu menggunakan kebebasan digital secara bertanggung jawab.

Tantangan berikutnya adalah menguatnya budaya populisme digital dan politik berbasis emosi. Platform media sosial dirancang untuk memaksimalkan perhatian pengguna melalui konten yang menarik, kontroversial, dan emosional. Konsekuensinya, perdebatan politik sering kali lebih didasarkan pada sentimen identitas, afiliasi kelompok, atau popularitas tokoh daripada argumentasi rasional. Fenomena ini menyebabkan ruang publik digital mengalami penurunan kualitas deliberasi karena masyarakat lebih terdorong untuk bereaksi secara spontan daripada melakukan refleksi kritis. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengikis budaya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat yang menjadi fondasi kehidupan demokratis.

Selain itu, pendidikan karakter politik juga menghadapi tantangan berupa krisis keteladanan kepemimpinan. Generasi muda saat ini lebih banyak belajar melalui figur publik yang hadir di media digital dibandingkan melalui tokoh masyarakat di lingkungan sosialnya. Sayangnya, tidak semua figur publik menunjukkan integritas moral yang dapat dijadikan teladan. Fenomena pencitraan politik, manipulasi opini, eksploitasi isu-isu sensitif, hingga penyebaran narasi yang bersifat provokatif menunjukkan bahwa kepemimpinan sering kali direduksi menjadi kemampuan membangun popularitas, bukan kemampuan mewujudkan kebajikan publik. Akibatnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bergeser dari kualitas moral menuju jumlah pengikut, tingkat keterpaparan media, atau popularitas digital.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah melemahnya kemampuan refleksi diri. Kehidupan digital yang berlangsung secara cepat mendorong budaya instan dalam memperoleh informasi maupun mengambil keputusan. Ruang untuk berpikir mendalam, melakukan evaluasi diri, dan mempertimbangkan konsekuensi etis dari suatu tindakan menjadi semakin sempit. Dalam konteks politik, kecenderungan tersebut dapat melahirkan perilaku reaktif, intoleran, dan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat sementara. Padahal, pendidikan karakter politik menuntut

kemampuan refleksi sebagai dasar pembentukan tanggung jawab moral dan kematangan dalam berpartisipasi di ruang publik.

Dari perspektif filsafat sosial-politik, tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama generasi digital bukanlah kekurangan informasi, melainkan krisis kebijaksanaan (*wisdom*) dalam mengelola informasi. Rasionalitas sering kali dikalahkan oleh kecepatan, sedangkan pertimbangan moral tersisih oleh logika popularitas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan karakter manusia. Oleh sebab itu, pendidikan karakter politik perlu diarahkan pada pembentukan kemampuan berpikir reflektif, penguatan integritas moral, dan pengembangan tanggung jawab sosial agar kemajuan teknologi tidak justru memperlemah kualitas kehidupan politik.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Ibnu Bajjah menawarkan perspektif yang relevan. Konsep *al-mutawaḥḥid* mengajarkan pentingnya menjaga independensi berpikir di tengah tekanan lingkungan sosial. Nilai ini sangat penting bagi generasi digital yang setiap hari berhadapan dengan algoritma media sosial, *echo chamber*, dan tekanan untuk mengikuti opini yang sedang populer. Seorang *al-mutawaḥḥid* tidak menolak kehidupan sosial, tetapi mampu menyaring informasi secara kritis, mempertahankan integritas moral, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Dengan demikian, konsep tersebut dapat dipahami sebagai fondasi bagi pembentukan warga digital (*digital citizen*) yang tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi informasi maupun polarisasi politik.

Lebih jauh, konsep *tadbīr al-nafs* memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi digital yang berlandaskan etika. Literasi digital selama ini umumnya dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi dan mengakses informasi. Padahal, kemampuan tersebut perlu disertai dengan pengendalian diri, tanggung jawab moral, dan kesadaran terhadap dampak sosial dari setiap aktivitas digital. Dalam perspektif Ibnu Bajjah, penguasaan teknologi tanpa pengelolaan diri hanya akan melahirkan individu yang cerdas secara teknis tetapi rapuh secara moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter politik harus mengintegrasikan dimensi literasi digital dengan pembentukan karakter sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui cara menggunakan teknologi, tetapi juga memahami nilai-nilai yang harus menjadi dasar penggunaannya.

Pemikiran ini juga sejalan dengan konsep digital citizenship, yang menekankan bahwa warga digital harus memiliki kemampuan berpikir kritis, menghormati hak orang lain, bertanggung jawab dalam menggunakan media digital, serta berpartisipasi secara etis dalam ruang publik. Namun demikian, pendekatan *digital citizenship* modern lebih banyak menitikberatkan aspek kompetensi dan perilaku digital. Sementara itu, Ibnu Bajjah memberikan fondasi filosofis yang lebih mendalam melalui penekanan pada pembentukan akal, keutamaan moral, dan kesempurnaan diri sebagai syarat lahirnya perilaku politik yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Bajjah tidak menggantikan konsep *digital citizenship*, tetapi memperkaya landasan etikanya.

Rekonstruksi Pendidikan Karakter Politik Berbasis Etika Kepemimpinan Ibnu Bajjah

Analisis terhadap filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah menunjukkan bahwa nilai-nilai etika kepemimpinannya tidak hanya memiliki signifikansi historis, tetapi juga dapat direkonstruksi menjadi paradigma pendidikan karakter politik yang relevan dengan tantangan masyarakat digital. Rekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar memindahkan konsep-konsep klasik ke dalam konteks modern, melainkan melakukan reinterpretasi kritis agar prinsip-prinsip filosofis Ibnu Bajjah mampu menjawab persoalan kontemporer seperti polarisasi politik, disinformasi, budaya instan, krisis integritas, serta melemahnya kemampuan berpikir reflektif pada generasi digital. Dengan demikian, pendidikan karakter politik tidak lagi dipahami sebagai proses transfer

pengetahuan kewargaan semata, tetapi sebagai proses pembentukan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan moral, dan tanggung jawab sosial (Akbar & Alkhadafi, 2025).

Berdasarkan hasil analisis pada subbab sebelumnya, penelitian ini merekonstruksi pendidikan karakter politik berbasis etika kepemimpinan Ibnu Bajjah ke dalam empat dimensi utama, yaitu rasionalitas kritis, integritas moral, kepemimpinan reflektif, dan orientasi kemaslahatan publik. Keempat dimensi tersebut merupakan sintesis antara konsep *al-'aql*, *faḍīlah*, *tadbīr al-nafs*, dan *sa'ādah* dalam pemikiran Ibnu Bajjah dengan kebutuhan pendidikan karakter pada era digital.

1. Rasionalitas Kritis (*Critical Rationality*)

   Dimensi pertama adalah pengembangan rasionalitas kritis yang berakar pada konsep *al-'aql*. Ibnu Bajjah menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam membedakan kebenaran dari kesalahan serta menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam konteks generasi digital, rasionalitas tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan berpikir logis, tetapi juga mencakup kemampuan mengevaluasi informasi, mengenali bias algoritma, memverifikasi sumber berita, dan menyusun argumentasi yang berbasis bukti.

   Dengan demikian, pendidikan karakter politik harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi politik yang beredar di media digital. Peserta didik perlu dibiasakan melakukan analisis terhadap narasi publik, memahami berbagai perspektif, serta menghindari pengambilan keputusan berdasarkan emosi atau tekanan kelompok. Rasionalitas kritis menjadi benteng utama dalam menghadapi fenomena *echo chamber*, polarisasi politik, dan penyebaran disinformasi.

2. Integritas Moral (*Moral Integrity*)

   Dimensi kedua adalah integritas moral yang bersumber dari konsep *faḍīlah*. Menurut Ibnu Bajjah, kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, melainkan oleh karakter moral yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian moral harus menjadi fondasi dalam proses pendidikan karakter politik.

   Pada era digital, integritas moral menjadi semakin penting karena ruang publik sering kali mendorong budaya pencitraan, kompetisi popularitas, dan penyebaran informasi yang manipulatif. Oleh sebab itu, pendidikan karakter politik perlu membangun kesadaran bahwa keberhasilan politik tidak hanya diukur melalui pengaruh sosial atau jumlah pengikut di media digital, tetapi melalui konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Integritas menjadi prasyarat lahirnya kepemimpinan yang memperoleh legitimasi bukan karena viralitas, melainkan karena kepercayaan publik.

3. Kepemimpinan Reflektif (*Reflective Leadership*)

   Dimensi ketiga merupakan hasil rekonstruksi konsep *tadbīr al-nafs*. Ibnu Bajjah menegaskan bahwa seseorang tidak mungkin mampu memimpin masyarakat apabila belum mampu memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan karakter politik harus mengembangkan kemampuan refleksi diri sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

   Kepemimpinan reflektif diwujudkan melalui kemampuan mengevaluasi tindakan, mengendalikan emosi, mengelola ambisi pribadi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan politik. Dalam lingkungan digital yang serba cepat, refleksi menjadi kemampuan yang semakin langka. Banyak keputusan diambil secara spontan sebagai respons terhadap tekanan media sosial atau opini publik. Padahal, pemimpin yang baik

memerlukan kemampuan untuk berhenti sejenak, melakukan pertimbangan rasional, dan memilih tindakan berdasarkan prinsip etis, bukan sekadar tuntutan popularitas.

4. Orientasi Kemaslahatan Publik (*Public Virtue Orientation*)

   Dimensi terakhir merupakan pengembangan dari konsep *sa'ādah*. Ibnu Bajjah memandang bahwa tujuan tertinggi kehidupan politik adalah terciptanya masyarakat yang memungkinkan setiap individu mencapai kesempurnaan moral dan intelektual. Oleh karena itu, pendidikan karakter politik harus menanamkan orientasi pelayanan kepada masyarakat, penghormatan terhadap keadilan sosial, serta komitmen terhadap kepentingan bersama.

   Dalam konteks generasi digital, orientasi ini diwujudkan melalui partisipasi politik yang bertanggung jawab, penggunaan media sosial secara etis, penghormatan terhadap keberagaman pendapat, dan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial. Pendidikan karakter politik tidak hanya bertujuan mencetak individu yang memiliki pengetahuan politik, tetapi juga membentuk warga digital yang berkontribusi terhadap terciptanya ruang publik yang sehat, inklusif, dan demokratis.

Hasil rekonstruksi penelitian ini dapat dirumuskan dalam model konseptual berikut.

Landasan Pemikiran Ibnu Bajjah	**Nilai Karakter Politik**	**Kompetensi Generasi Digital**
Al-'Aql	Rasionalitas kritis	Berpikir kritis, literasi informasi, pengambilan keputusan berbasis bukti
Fadilah	Integritas moral	Kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keberanian moral
Tadbir al-Nafs	Kepemimpinan reflektif	Pengendalian diri, evaluasi diri, ketahanan moral, regulasi emosi
Sa'adah	Orientasi kemaslahatan publik	Kepedulian sosial, partisipasi demokratis, etika digital, pelayanan publik

Model tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter politik tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter personal. Individu yang memiliki rasionalitas kritis tetapi tidak memiliki integritas moral berpotensi menyalahgunakan pengetahuan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, integritas moral tanpa kemampuan berpikir kritis dapat menyebabkan seseorang mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, keempat dimensi tersebut harus dikembangkan secara terpadu.

Secara teoretis, model ini memperluas kajian mengenai pendidikan karakter politik dengan menghadirkan filsafat sosial-politik Islam sebagai landasan konseptual. Selama ini, pendidikan karakter politik lebih banyak dipengaruhi oleh teori kewargaan demokratis (*democratic citizenship*), *civic education*, maupun teori perkembangan moral. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Bajjah juga menawarkan fondasi filosofis yang kuat karena menempatkan rasionalitas, keutamaan moral, pengelolaan diri, dan kemaslahatan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar merevitalisasi pemikiran klasik, tetapi juga memperluas horizon pengembangan filsafat pendidikan politik melalui dialog antara tradisi intelektual Islam dan tantangan masyarakat digital.

Dari sisi praktis, model yang ditawarkan memiliki implikasi bagi lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi dan sekolah yang mengembangkan pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan karakter. Proses pembelajaran perlu diarahkan pada pembiasaan dialog kritis,

analisis isu-isu politik kontemporer, refleksi etis terhadap penggunaan media digital, serta pembentukan kepemimpinan berbasis keteladanan. Dengan demikian, pendidikan karakter politik tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami konsep demokrasi dan kewargaan, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang rasional, berintegritas, reflektif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Rekonstruksi ini merupakan kontribusi utama penelitian karena memperlihatkan bahwa filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah tetap memiliki daya jelajah konseptual dalam menjawab persoalan abad ke-21. Nilai-nilai yang lahir dari konteks Andalusia abad ke-12 ternyata dapat ditransformasikan menjadi paradigma pendidikan karakter politik yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Bajjah tidak hanya menjadi objek kajian sejarah filsafat Islam, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan teori pendidikan karakter politik yang kontekstual, transformatif, dan berorientasi pada pembentukan kepemimpinan etis di era digital.

Kontribusi Teoretis terhadap Pengembangan Filsafat Sosial-Politik dan Pendidikan Karakter

Rekonstruksi etika kepemimpinan Ibnu Bajjah yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan reinterpretasi terhadap khazanah filsafat politik Islam klasik, tetapi juga menghasilkan kontribusi teoretis bagi pengembangan filsafat sosial-politik dan pendidikan karakter pada era digital. Selama ini, kajian mengenai Ibnu Bajjah lebih banyak menempatkan pemikirannya sebagai bagian dari sejarah filsafat Islam, dengan fokus pada konsep *al-mutawaḥḥid*, hubungan antara individu dan negara, atau pengaruh filsafat Yunani terhadap pemikirannya. Pendekatan tersebut telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi Ibnu Bajjah dalam tradisi intelektual Islam, tetapi belum banyak mengembangkan implikasi konseptualnya bagi persoalan sosial-politik kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan Ibnu Bajjah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kerangka normatif yang mampu menjawab tantangan pembentukan karakter politik generasi digital.

Kontribusi teoretis pertama penelitian ini adalah pergeseran paradigma dari pembacaan historis menuju pembacaan rekonstruktif terhadap pemikiran Ibnu Bajjah. Dalam banyak penelitian terdahulu, *Tadbīr al-Mutawaḥḥid* dipahami sebagai respons filosofis terhadap kondisi politik Andalusia pada abad ke-12. Penelitian ini tidak menolak konteks historis tersebut, tetapi berargumen bahwa nilai-nilai yang dikembangkan Ibnu Bajjah memiliki sifat transhistoris karena bertumpu pada prinsip-prinsip universal, seperti rasionalitas, keutamaan moral, pengendalian diri, dan orientasi terhadap kemaslahatan. Melalui pendekatan rekonstruktif, konsep-konsep tersebut diposisikan sebagai sumber konseptual untuk membangun paradigma pendidikan karakter politik yang relevan dengan masyarakat digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas fungsi filsafat Islam dari objek kajian sejarah menjadi sumber pengembangan teori sosial-politik kontemporer.

Kontribusi kedua adalah integrasi antara filsafat politik Islam dan teori pendidikan karakter. Selama ini, pendidikan karakter lebih banyak dikembangkan berdasarkan teori perkembangan moral, pendidikan kewarganegaraan, atau pendekatan psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pembentukan sikap, perilaku, dan kompetensi kewargaan, tetapi sering kali belum memberikan landasan filosofis yang utuh mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan orientasi kepemimpinan. Melalui rekonstruksi pemikiran Ibnu Bajjah, penelitian ini menawarkan fondasi filosofis yang menempatkan pendidikan karakter sebagai proses penyempurnaan akal (*al-'aql*), pembentukan keutamaan (*faḍīlah*), pengelolaan diri

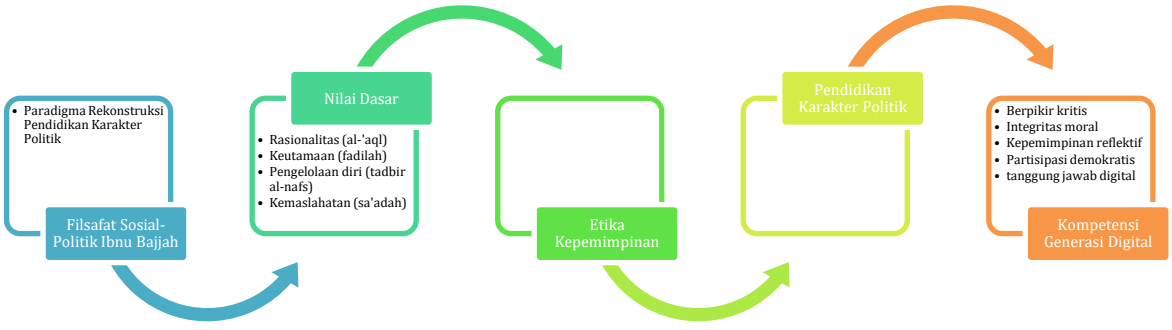
(*tadbīr al-nafs*), dan pencapaian kemaslahatan bersama (*sa'ādah*). Integrasi ini memperkaya diskursus pendidikan karakter dengan menghadirkan perspektif filsafat politik Islam yang selama ini masih relatif kurang dieksplorasi.

Kontribusi ketiga adalah pengembangan konsep pendidikan karakter politik yang berorientasi pada kepemimpinan etis. Banyak model pendidikan karakter menekankan nilai-nilai umum seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut memang penting, tetapi belum secara spesifik diarahkan pada pembentukan karakter kepemimpinan dalam ruang publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter politik memerlukan orientasi yang lebih luas, yaitu membentuk individu yang mampu berpikir rasional, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral, mengendalikan kepentingan pribadi, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, karakter politik dipahami sebagai perpaduan antara kapasitas intelektual, integritas etis, dan tanggung jawab sosial.

Kontribusi keempat berkaitan dengan penguatan landasan etis bagi konsep kewargaan digital (*digital citizenship*). Literatur mengenai *digital citizenship* umumnya menitikberatkan pada kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati hak digital orang lain, menjaga keamanan data, dan berpartisipasi secara produktif dalam ruang digital. Penelitian ini berpendapat bahwa kompetensi tersebut perlu dilengkapi dengan dimensi filosofis yang lebih mendalam. Melalui pemikiran Ibnu Bajjah, kewargaan digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis atau perilaku sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari karakter manusia yang rasional, berkeutamaan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, konsep *digital citizenship* memperoleh fondasi etis yang lebih kokoh karena berakar pada pembentukan karakter, bukan hanya penguasaan teknologi.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan filsafat kepemimpinan Islam. Diskursus kepemimpinan Islam selama ini banyak didominasi oleh pembahasan mengenai konsep *khilāfah*, *imāmah*, atau kepemimpinan profetik. Sementara itu, dimensi etika kepemimpinan dalam tradisi filsafat Islam klasik belum memperoleh perhatian yang seimbang. Rekonstruksi pemikiran Ibnu Bajjah menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan struktur kekuasaan, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter yang dimulai dari kemampuan seseorang memimpin dirinya sendiri. Perspektif ini memperkaya teori kepemimpinan Islam dengan menempatkan pengelolaan diri (*self-governance*) sebagai prasyarat bagi kepemimpinan sosial.

Secara konseptual, hasil penelitian ini dapat dirumuskan dalam sebuah paradigma yang menggambarkan hubungan antara filsafat sosial-politik Ibnu Bajjah dan pendidikan karakter politik sebagai berikut.



Paradigma tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter politik tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan manusia yang utuh. Kompetensi digital, kemampuan

berkomunikasi, maupun partisipasi politik hanya akan memberikan manfaat apabila didasarkan pada karakter yang berkeutamaan. Sebaliknya, kemajuan teknologi tanpa fondasi etika berpotensi melahirkan bentuk-bentuk kepemimpinan yang manipulatif, oportunistik, dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pendidikan karakter politik berbasis etika kepemimpinan Ibnu Bajjah bagi generasi digital melalui pendekatan filsafat sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Bajjah tidak hanya memiliki nilai historis sebagai bagian dari tradisi filsafat politik Islam, tetapi juga memiliki relevansi konseptual dalam menjawab tantangan pendidikan karakter pada era digital. Etika kepemimpinan Ibnu Bajjah dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu rasionalitas (*al-'aql*), keutamaan moral (*faḍīlah*), pengelolaan diri (*tadbīr al-nafs*), dan orientasi pada kemaslahatan bersama (*sa'ādah*). Keempat prinsip tersebut menjadi fondasi normatif bagi pembentukan karakter politik yang mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual, integritas moral, kepemimpinan reflektif, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga model konseptual yang dihasilkan belum diuji dalam praktik pendidikan. Selain itu, fokus penelitian hanya pada pemikiran Ibnu Bajjah sehingga belum membuka dialog komparatif dengan pemikir filsafat politik Islam maupun teori kepemimpinan kontemporer secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R., & Alkhadafi, R. (2025). Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Strategi di Era Disrupsi. *Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, *2*(2), 257–272. https://doi.org/https://doi.org/10.61166/ahnaf.v2i2.25

Alkhadafi, R. (2026). Literasi Digital sebagai Basis Pengembangan Berpikir Kritis Mahasiswa : Perspektif Filsafat Pendidikan. *Journal Islamic Studies of Muhammadiyah*, *1*(2), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jism.v1i2.11606

Alkhadafi Rahmad. (2025). Konsep Negara Ideal Plato dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Kepemimpinan Era Kontemporer. *Indonesian Journal of Science Review*, *1*(1), 11–21.

Hariati, T., & Amelia, N. (2026). *Peran Literasi Digital dalam Mengembangkan Regulasi Emosi pada Anak Usia Dini sebagai Keterampilan Abad ke-21*. *7*(1), 1093–1102. https://doi.org/10.37985/murhum.v7i1.2057

Kohar, A. (2020). Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitāb Tadbīr Al-Mutawahhid. *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, *3*(1), 69–90.

Manurung, A. S., & Islam; Gazali. (2025). IBN BAJJAH ' S CONCEPT OF AL-MUTAWWAHID AS A FORM OF STRESS MANAGEMENT AND MENTAL HEALTH IN THE MODERN ERA. *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, *17*(2), 278–300.

Moleong J lexy. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.

Mubarok, A. F., Zuhdi, A., & Sutiah, S. (2025). Revitalizing Islamic Religious Education Curriculum in the Digital Era: A Philosophical Reflection of Sayyed Hossein Nasr and Yasraf Amir Piliang. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, *3*(2), 91–105. https://doi.org/10.59001/pjier.v3i2.547

Nurhalimah, H., Devina, M. F., Rizanata, Z., Al-azhary, S., & Barat, J. (2025). Pemikiran dan Filsafat Ibnu Bajjah. *Al-Falsafah: Jurnal Pemikiran Dan Filsafat Islam*, *1*(1), 32–40.

https://doi.org/https://doi.org/10.61166/falsafah.v1i1.4

Pangesti, H. W., & Hidayat, R. (2023). Tindakan Manusia Menurut Ibnu Bajjah dalam Kitab Tadbir al-Mutawahhid. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(4), 26–34.

Pratama, S., Ashari, M., Zulkarnain, S. A. B., & Sabrina, E. (2025). The Importance of Digital Literacy in the World of Education : Learning Transformation in the Digital Era Pentingnya Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan : Transformasi Pembelajaran di Era Digital. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, *6*(2), 554–561. https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkip.v6i2.1388

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman, Journal of Management, Accounting and AdministrationVol. 1, No.2 : 2024, hlm 81. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), 77–84. https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93

Ramadhani, R. N., Efendi, N., & Aziz, A. (2025). Peran dan Fungsi Kepemimpinan Pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(1), 25–36. https://doi.org/10.37348/aksi.v4i1.712

Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, *1*(2), 77–84. https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Alfabeta.

Taib, M. M. (2026). Ibn Bājjah's Conception of the Soul and the Reconstruction of Human Psychology. *IIUM Journal of Human Sciences*, *8*(1), 100–118.